

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang nomor 83 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kelurahan, pada pasal 3 Kelurahan mempunyai tugas membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan tata pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta kemasyarakatan dalam lingkup kelurahan sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi berperan sangat penting dalam rangka pelayanan publik yang cepat mudah, cepat dan efisien diperlukan untuk keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan pengaktualisasikan visi, misi, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023, maka keselarasan antara RPJMD Kota Tangerang dengan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Batuceper tahun 2019-2023. Adapun tujuan dan sasaran Kecamatan Batuceper Tahun 2019- 2023 adalah, **“Terwujudnya Tata Kelola Kecamatan yang baik”**.

Salah satu rencana aksi reformasi pemerintah Kota Tangerang, adalah *Quik Wins* dengan kegiatan/ sub kegiatan prioritas diantaranya Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu:

1. Implementasi Masterplan-Government/ SPBE
  - Penyiapan Infrastruktur Dasar (Hardware)
  - Peyiapan Infrastruktur Dasar (Software)
2. Penyiapan Regulasi dan Kelembagaan
3. Peningkatan Kapasitas SDM pada Perangkat Daerah
4. Pemantauan dan Evaluasi
5. Tindak Lanjut Hasil

Implementasi Masterplan-Government/ SPBE berpijak pada kebijakan penerapan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018

tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional mengamanatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Untuk membangun tata kelola pemerintahan yang cepat dan efisien. Oleh karena itu diperlukan arsitektur SPBE sebagai pedoman dalam membangun serta menyelaraskan sistem pada setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Saat ini bantuan – bantuan sosial yang disalurkan kepada warga melalui Dinas Sosial Kota Tangerang, maupun data-data lain seperti bantuan sosial dan data sarana dan prasarana yang ada di wilayah, selalu menggunakan data yang membutuhkan verifikasi dan validasi data yang berulang karena tidak adanya database yang dapat menjadi bahan rujukan yang terintegrasi dengan Dinas Sosial atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Melalui pemetaan arsitektur yang jelas proses bisnisnya, akan memudahkan dalam penemuan data kembali yang datanya jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemodelan proses yang dapat menggambarkan alur dari aktivitas bisnis yang cocok yaitu dengan *Business Process Model and Notation* (BPMN). Dengan BPMN alur proses dapat digambarkan secara sederhana, jelas dan dapat mudah dimengerti namun dapat mewakili proses yang kompleks.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas sebagai bahan penelitian mengambil judul “Perancangan Arsitektur Proses Bisnis Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Tangerang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 (Studi Kasus Kelurahan Porisgaga Baru Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diidentifikasi, yaitu :

1. Proses Bisnis yang ada di pemerintah Kota Tangerang belum terintegrasi sampai dengan tingkat kelurahan.
2. Tidak adanya pemetaan yang jelas proses bisnis yang ada dengan proses bisnis yang ada di tingkat kelurahan di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang, khususnya kegiatan penyaluran bantuan sosial dan

pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah kelurahan Porisgaga Baru Kecamatan Batucapeper Kota Tangerang .

3. Peraturan Walikota Tangerang nomor 26 tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun dalam penetapan tata kelola SPBE, unsur yang infrastruktur SPBE, dijelaskan pada BAB VI Infrastruktur Pasal 22, namun tidak menjelaskan bagaimana Infrastruktur tersebut dapat terintegrasi sampai dengan tingkat kelurahan.
4. Kebutuhan tata kelola e-government yang baik dalam mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses perlu dituangkan dalam Arsitektur Proses Bisnis.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, supaya penelitian dapat mengarah pada tujuan akhir penelitian, maka perlu adanya batasan masalah, dengan pemanfaatan *Enterprise Architecture* (EA) merupakan pengorganisasian dari proses bisnis, sangat membantu dalam proses integrasi. Framework enterprise architecture menggunakan The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (Open Group, 2009) Architecture Development Method (ADM), sebagai pendekatan untuk merancang EA pada Pemerintah Kota Tangerang khususnya Kelurahan Porisgaga Baru dan untuk metode penyelarasan agar efisien sesuai keinginan dan kebutuhan organisasi menggunakan *Business Process Modelling Notation* (BPMN).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk memastikan pelaksanaan penerapan domain arsitektur layanan SPBE yang menjadi target arsitektur SPBE nasional perlu ditetapkan wali layanan SPBE. Setiap Domain Arsitektur SPBE Nasional disusun berdasarkan Metadata Arsitektur SPBE Nasional, Integrasi antar Domain Arsitektur SPBE Nasional mengikuti relasi Metadata Arsitektur SPBE Nasional.

Instansi Pemerintah Daerah menggunakan arsitektur proses bisnis berdasarkan arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Pusat/ SPBE Nasional.

Rumusan masalah yang dapat ditentukan berdasarkan identifikasi masalah dalam penyusunan Arsitektur Proses Bisnis adalah sebagai berikut:

- Apa saja kebutuhan perancangan Arsitektur Proses Bisnis ini, yang menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur secara baku.
- Bagaimana mengklasifikasikan proses bisnis berdasarkan referensi arsitektur proses bisnis, ada 2 (dua) tingkat (SPBE Nasional), yaitu sektor pemerintahan dan urusan pemerintahan, sampai dengan tingkat kelurahan proses bisnis level 5.

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

5. Untuk mengetahui bahwa framework TOGAF ADM dengan metode BPMN dapat menghasilkan proses bisnis yang dapat menjadi acuan pelaksanaan proses bisnis bagi penyaluran bantuan sosial dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Kelurahan Porisgaga Baru Kecamatan Batuaceper Kota Tangerang.
6. Untuk meningkatkan efisiensi (biaya SPBE) operasional lembaga TI, meningkatkan standar kualitas layanan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian layanan sampai dengan tingkat kelurahan.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis
  - Penerapan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh pada saat kuliah online, melatih untuk menganalisa dan berfikir secara kritis sehingga menghasilkan *output* yang berkualitas dalam pemecahan masalah.
- b. Bagi instansi pemerintah
  - Framework TOGAF ADM dan metode penyesuaian BPMN dapat menghasilkan proses bisnis yang dapat menjadi acuan atau pedoman

dalam pelaksanaan sampai dengan proses bisnis level 5 yang terintegrasi sampai pada tingkat kelurahan dalam hal ini untuk penyaluran bantuan –bantuan sosial dan pemeliharaan sarana dan prasarana di wilayah kelurahan.

- Membantu mengetahui komponen apa saja yang perlu dipetakan dalam arsitektur proses bisnis sesuai PermenPANRB nomor 19 tahun 2018.
- Mempercepat proses implementasi pencapaian peta rencana SPBE.
- Kolaborasi antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi yang terpadu saling terintegrasi dan dapat terdokumentasikan.

c. Bagi pembaca

- Memberikan wawasan dan memudahkan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.